

BAB II

DISKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Bab III Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.

- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketertarikan dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional Yang di laksanakan Oleh OPD Kecamatan Jenawi : Tidak Ada

C. Standard Operating Procedure (SOP) OPD Kecamatan Jenawi

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan bagi Kecamatan Jenawi untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan prosedur. SOP yang telah dibuat antara lain :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang datang Langsung;
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang tidak datang Langsung;
4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
5. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik;
6. SOP Pelayanan Pengaduan Langsung;
7. SOP Layanan Kartu Keluarga(KK);
8. SOP Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
9. SOP Pelayanan Pindah Antar Kecamatan;
10. SOP Administrasi Surat Masuk;
11. SOP Administrasi surat Keluar;
12. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
13. SOP Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
14. SOP Pengajuan SPP dan SPM;
15. SOP Pengajuan GU/TU;

16. SOP Penerbitan Izin IUMK;
17. SOP Penerbitan Izin SIUP;
18. SOP Pelaksanaan Picket Kantor;
19. SOP Pembinaan Linmas;
20. SOP Pembinaan Wilayah;
21. SOP Rekomendasi Surat Pengantar SKCK dan Ijin Keramaian;
22. SOP Rekomendasi Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan;
23. SOP Rekomendasi surat Pengantar Nikah;
24. SOP Rekomendasi Dispensasi Nikah;
25. SOP Layanan Ligalisir;
26. SOP Layanan Surat Keterangan Ahli Waris;
27. SOP Layanan Pernyataan domisili dan Domisili Usaha;
28. SOP Layanan Pernyataan beda Nama/Identitas;
29. SOP Layanan Pengajuan Proposal Masjid;
30. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

D. Perda/Perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jenawi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103

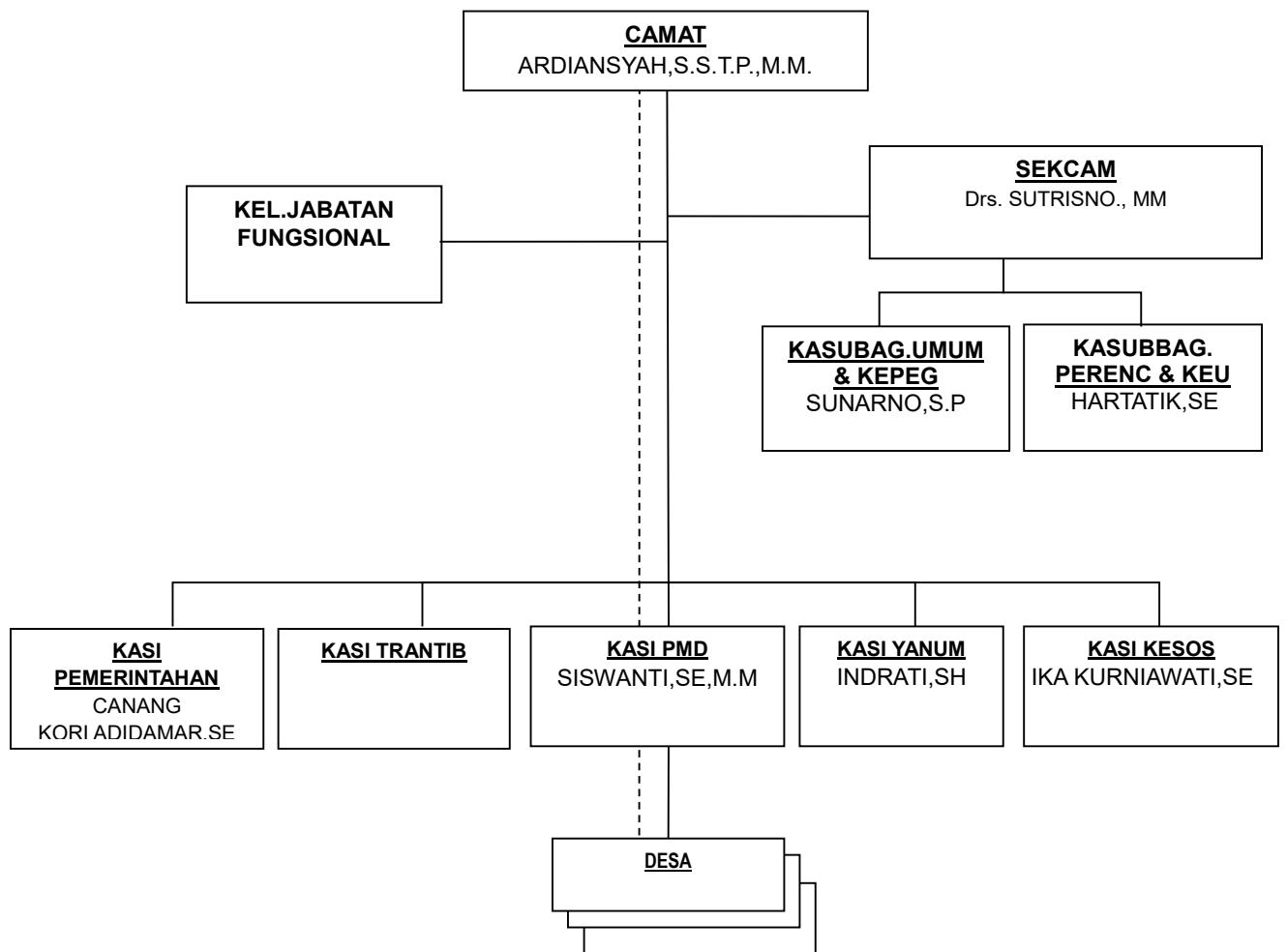
- Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2023.
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Jenawi sebagai berikut:



Ket : ___ Garis Komando
 ----- Garis Koordinasi

F. KEPEGAWAIAN

Kami konfirmasikan bahwa kondisi kepegawaian di Kantor Camat Jenawi sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Kecamatan Jenawi Keseluruhan :

NO	NAMA	NIP	STA TUS	PANGKAT/GOL
1	Ardiansyah,S.S.T.P., M.M	19790709 199810 1 002	PNS	Pembina Tk.I, ,IV/b
2	Drs.Sutrisno,MM	19660404 199303 1 009	PNS	Pembina , IV/a
3	Indrati,SH	19660702 198607 2 002	PNS	Penata Tk.I, III/d
4	Canang Kori Adidamar,SE	19811227 200604 1 006	PNS	Penata Tk.I, III/d
5	Ika Kurniawati,SE	19821023 201101 2 012	PNS	Penata Tk.I , III/d
6	Kabul Karyadi,SE	19720710 199312 1 002	PNS	Penata Tk.I.,III/d
7	Hartatik,SE	19780711 199903 2 002	PNS	Penata , III/c
8	Siswanti,SE	19870314 200606 2 001	PNS	Penata Muda Tk.I, III/b
9	Mardoko	19670309 200701 1 020	PNS	Pengatur Tk I / II.d
10	Budda Udayana Kusrin	19800405 199903 1 003	PNS	Penata Muda, III/a
11	Sunarno,SP	19750320 201001 1 002	PNS	Penata Muda Tk.I, III/b
12	Sadi	19681123 200902 1 001	PNS	Pengatur Tk. I, II/d
13	Supriyadi	19741012 201001 1 009	PNS	Pengatur Tk.I, II/d
14	Sutarno	19721120 200906 1 001	PNS	Pengatur Tk.I,II/d
15	Kris Bintoro,AMd		THL	
16	Hermawan,S.Psi		THL	
17	Wahyu Nugroho		THL	
18	Dani Nur Setyawan		THL	
19	Try Purnomo Aji		THL	

20	Agung Setia Budi		THL	
21	Ervan Adi Nugroho		THL	
22	Yulianingsih Dwi Nur Hidayah		THL	
23	Usman Prabowo		THL	
24	Wibowo Bayu Aji		THL	
25	Andika Mustofa		THL	
26	Murti Eko Wibowo		THL	
27	Andri Yuli Rusdianto		THL	
28	Dwi Prasetyo		THL	
29	Agus Dwilarso		THL	
30	Kuncorodadi		THL	
31	Ahmad Mustofa		THL	
32	Ibnu Fadhila Handono		THL	
33	Ricko Andrian		THL	
34	Diamita Prima Reksa Putri,SH		THL	

2. Jumlah Pegawai Struktural SKPD Yang Terisi :

NO	Nama	Jabatan Struktural	Memenuhi Persyaratan DIKLATPIM	Memenuhi syarat Kepegangatan
1	Ardiansyah,S.S.T.P.,M.M	Camat	V	V
	Drs.Sutrisno,MM	Sekcam	V	V
2	Canang Kori Adidamar,SE	Kasi Tapem	V	V
3	Siswanti,S.E.,M.M	Kasi PMD	V	V
4	Ika Kurniawati,SE	Kasi Kesos	V	V
5	Indrati, SH	Kasi Yanum	V	V
6	Kabul Karyadi,S.E	Kasi Trantib	V	V
7	Sunarno,S.P	Kasubag Umpeg	V	V

8	Hartatik,SE	Kasubag Peren dan keuangan	V	V
---	-------------	----------------------------	---	---

3. Daftar pejabat Struktural SKPD yang Belum Terisi :

NO	Nama	Jabatan Struktural	Eselon
	Nihil		

4. Daftar pejabat Fungsional Umum :

NO	Nama	NIP	Nama Jabatan Fungsional
1	Budda Udayana Kusrin	19800405 199903 1002	Pengadministrasi Umum
2	Mardoko	19670309 200701 1020	Pengelola Kesejahteraan Sosial
3	Sutarno	19721120 200906 1001	Pengelola Ketertiban
4	Sadi	19681123 200902 1001	Pengelola Administrasi Pemerintahan
5	Supriyadi	19741012 201001 1009	Pengolah Data Pelayanan

5. Daftar Pejabat Fungsional Umum yang belum terisi :

NO	Nama jabatan Fungsional	Jumlah
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1 Formasi
2	Verifikator Keuangan	1 formasi
3	Bendahara	1 formasi
4	Penata Laporan Keuangan	1 formasi
5	Peramu Kebersihan	1 Formasi
6	Pengelola sarana dan prasarana	1 formasi
7	Pengelola Kepegawaian	1 formasi
8	Petugas Keamanan	1 Formasi
9	Jf. Arsiparis Mahir	1 formasi
10	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1 formasi
	Jumlah	10 fo rmasi

BAB III**CAPAIAN KINERJA (IKK)****A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***Nihil***B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR***Nihil***C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 11.744.800,00 Realisasi: Rp. 11.744.800,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1) Pemeliharaan Mebel Anggaran: Rp. 3.800.800,00 Realisasi: Rp. 3.800.800,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah mebel yang dipelihara 20 unit	20 unit (100.00%)		

			Pemerintahan Daerah				
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 7.140.000,00 Realisasi: Rp. 7.130.000,00 Persentase: (99,86%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 10 unit	10 unit (100.00%)	
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 65.054.900,00 Realisasi: Rp. 65.054.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara 2 Unit	2 Unit (100.00%)	
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 2.710.000,00 Realisasi: Rp. 2.710.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 1050 dokumenSatuan	1050 dokumenSatuan (100.00%)	
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB	1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya Anggaran: Rp. 20.900.000,00 Realisasi: Rp. 20.900.000,00	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan 27 unit	27 unit (100.00%)	

		UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase: (100,00%)				
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 29.150.000,00 Realisasi: Rp. 29.150.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit	3 Unit (100.00%)		
		e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.380.000,00 Realisasi: Rp. 1.380.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya bahan bacaan/koran 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 20.821.100,00 Realisasi: Rp. 20.821.100,00	Tersedianya bahan logistik kantor dan alat kebersihan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				Persentase: (100,00%)				
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 6.715.000,00 Realisasi: Rp. 6.715.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.626.248.524,00 Realisasi: Rp. 1.514.287.678,00 Persentase: (93,12%)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 14 orang	14 orang (100.00%)		
		g.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 23.500.000,00 Realisasi: Rp. 19.145.039,00 Persentase: (81,47%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 355.960.000,00 Realisasi: Rp. 352.600.000,00 Persentase: (99,06%)	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor dan terbayarnya kompensasi tanah kas desa untuk rlokasi bencana alam 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 37.045.000,00 Realisasi: Rp. 32.301.990,00 Persentase: (87,20%)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya 3 Unit	3 Unit (100.00%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 180.000,00 Realisasi: Rp. 180.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya materai 18 lembar	18 lembar (100.00%)		

			Pemerintahan Daerah					
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 3.215.000,00 Realisasi: Rp. 3.215.000,00 Persentase: (100,00%)	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 41.370.000,00 Realisasi: Rp. 41.370.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 4.242.500,00 Realisasi: Rp. 4.242.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen	4 dokumen (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*Nihil***C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN		a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 9.022.100,00 Realisasi: Rp. 9.022.100,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Desa	9 Desa (100.00%)		

			Pemerintahan Desa					
			b. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Anggaran: Rp. 8.095.900,00 Realisasi: Rp. 8.095.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 125 Orang	125 Orang (100.00%)		
			c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaran: Rp. 8.273.100,00 Realisasi: Rp. 8.273.100,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Desa	9 Desa (100.00%)		
			d. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 3.304.000,00 Realisasi:	Terlaksananya Survey kepuasan Masyarakat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

			PUBLIK, Kegiatan Peny elenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 3.304.000,00 Persentase: (100,00%)				
		e.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah 1 kegiatan	1 kegiatan (100.00%)		
		f.	PROGRAM P ENYELENGG ARAAN URUSAN PEM ERINTAHAN UMUM, Kegiatan Peny elenggaraan Urusan	1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 8.511.400,00 Realisasi:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	120 Orang (100.00%)		

			Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 8.511.400,00 Persentase: (100,00%)	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 120 Orang			
				2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Anggaran: Rp. 106.921.000,00 Realisasi: Rp. 106.413.500,00 Persentase: (99,53%)	Terlaksananya HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kab.Kra 2 Kegiatan	2 Kegiatan (100.00%)		
			g. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 16.353.400,00 Realisasi: Rp. 16.353.400,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			h. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 3.749.700,00 Realisasi: Rp. 3.749.700,00 Persentase: (100,00%)	Kegiatan Legalisasi 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

			yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
		i.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Anggaran: Rp. 105.600.000,00 Realisasi: Rp. 105.072.000,00 Persentase: (99,50%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan (100.00%)	
		j.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Anggaran: Rp. 6.702.200,00 Realisasi: Rp. 6.702.200,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakatan , Terlaksananya kegiatan Musrenbangcam 1 kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan, 1 kegiatan (50.00%)	
		k.	PROGRAM	1) Sinergitas dengan Kepolisian	Terlaksananya	12 bulan	

			KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 30.698.100,00 Realisasi: Rp. 30.698.100,00 Persentase: (100,00%)	pembinaan Linmas dan Pembinaan Wilayah 12 bulan	(100.00%)		
--	--	--	--	--	---	-----------	--	--

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Tahun 2023 secara umum program dan kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Jenawi dapat berjalan dengan baik dan pencapaian rata-rata 95,12 %. Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jenawi hanya mendapat alokasi dari APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian, Kecamatan Jenawi telah melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

B. SARAN

Untuk peningkatan bidang pelayanan masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga tingkat pemahaman serta pengetahuan perangkat kecamatan dapat mengikuti perkembangan baik dari segi peraturan yang harus diterapkan dan ketertiban administrasi birokrasi serta standar mutu pelayanan masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Jenawi, Januari 2024


CAMAT JENAWI
ARDIANSYAH, S.S.T.P., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 002